

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini membahas gambaran umum Kabupaten Lamongan yang meliputi berbagai aspek penting seperti profil daerah, kondisi geografis, demografi Kabupaten Lamongan, serta pendapatan daerah. Selain itu, bab ini juga mengulas peran institusi seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Pemerintah Kecamatan Lamongan dan Pemerintah Desa dalam mendukung pembangunan di wilayah ini. Pemahaman terhadap konteks ini penting untuk memberikan landasan bagi pembahasan lebih lanjut mengenai strategi pembangunan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Profil Kabupaten Lamongan memberikan penjelasan mengenai sejarah, identitas, dan visi-misi pembangunan daerah yang menjadi dasar arah kebijakan pemerintah. Kondisi geografis yang mencakup luas wilayah batas administratif serta potensi alam, memberikan gambaran mengenai sumber daya yang tersedia untuk mendukung pembangunan. Kemudian informasi tentang demografi, seperti jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan karakteristik sosial budaya, menjadi indikator penting untuk memahami kebutuhan masyarakat.

Pada bab ini terkait pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan. Bab ini juga memberikan perhatian pada instansi Bapenda sebagai pengelola utama pendapatan daerah, serta Bappelitbangda yang memiliki peran strategis dalam merumuskan

rencana pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah.

Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa juga sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten di tingkat lokal dan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat yang memiliki peranan penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif hingga ke tingkat masyarakat. Pemahaman tentang struktur, fungsi, dan kinerja instansi ini relevan untuk memahami bagaimana koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan.

Secara keseluruhan, bab ini penting untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai Kabupaten Lamongan sebagai dasar analisis lebih lanjut. Informasi ini relevan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada, serta untuk merancang strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah dan ruang lingkup pembahasan dalam bab ini untuk menunjukkan hubungan antara karakteristik Kabupaten Lamongan dan peran instansi pemerintah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik.

## **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Lamongan**

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah 1.813 km atau setara dengan 3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur.

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Lamongan



Sumber: Situs Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2020.

Berdasarkan Gambar 2.1 yang merupakan Peta Kabupaten Lamongan, wilayah administratif Kabupaten Lamongan terbagi menjadi 27 kecamatan, 12 kelurahan dan 476 desa. Selain itu, Kabupaten Lamongan merupakan juga salah satu daerah di pesisir utara Provinsi Jawa Timur yang berada di sepanjang pantai utara Pulau Jawa yang dilalui jalur utama Pantura antara Jakarta dan Surabaya. Jalan ini melewati kecamatan Paciran yang mempunyai beraneka ragam tempat wisata. Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah kebudayaan Arek. Masyarakat Arek terkenal sebagai masyarakat yang ‘keras’ dari segi bahasanya. Hal ini dapat dilihat dari segi nada suara saat berbicara sangat keras serta kosa kata yang digunakan menggunakan bahasa Jawa *ngoko* yang berbeda jika dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah, karena wilayah Jawa Tengah terkenal dengan bahasa yang ‘halus’.

Kabupaten Lamongan sendiri merupakan salah satu wilayah dalam kawasan metropolitan Kota Surabaya, yaitu Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Pemerintah Provinsi Jawa Timur memproyeksikan kawasan tersebut sebagai kawasan ekonomi berbasis industri yang terdiri dari industri makanan dan minuman, farmasi, pabrik semen, serta petrokimia. Kemudian Pemerintah Kabupaten Lamongan juga memprioritaskan pembangunan di beberapa sektor, yaitu sektor pertanian yang meliputi pertanian, perkebunan, dan perikanan, sektor pariwisata, sebagai sektor andalan, serta sektor industri terutama agroindustri dengan tetap menjaga kelanjutan pembangunan.

Di Kabupaten Lamongan bagian tengah terdapat dataran rendah yang bergelombang dan tanah berawa. Di bagian selatan terdapat pegunungan, yang merupakan ujung timur dari Pegunungan Kendeng. Profil Kabupaten Lamongan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

1. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket Tikung Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo Brondong, Paciran, dan Kecamatan Solokuro.
3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren,

Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun dan Glagah. Hampir setiap musim hujan kawasan ini pasti terkena dampak banjir.

### **2.1.1 Profil Kabupaten Lamongan**

Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang memiliki banyak potensi unggulan, Pertama yaitu terdapat hasil pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai. Kedua, perikanan (perikanan hasil laut dan perairan air tawar). Ketiga, yaitu peternakan (ayam pedaging, sapi potong, kambing, ayam buras). Keempat, perkebunan contohnya seperti produksi tembakau dan tebu. Kelima yaitu pariwisata yang mana Kabupaten Lamongan memiliki banyak tempat-tempat pariwisata seperti Goa Maharani, WBL (Wisata Bahari Lamongan), Makam Sunan Drajat dll.

Kabupaten Lamongan memiliki beberapa peluang investasi yaitu pada sektor Primer, Kabupaten Lamongan memiliki potensi pada pertanian, perikanan, dan perkebunan. Pada sektor sekunder memiliki potensi pada industri makanan dan minuman serta pengolahan ikan. Pada sektor tersier terdapat potensi perdagangan dan pariwisata. Kabupaten Lamongan juga merupakan kabupaten yang memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah utamanya Jawa Timur hal ini dikarenakan Lamongan termasuk dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkartasusila.

### **2.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan**

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 6° 51' - 7° 23' Lintang Selatan dan 112° 33' – 112° 34 Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km<sup>2</sup> atau ±3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa

Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten. Batas wilayah administrasi Kabupaten Lamongan adalah: Sebelah Utara perbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian bluluk, Modo, dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

### **2.1.3 Demografi Kabupaten Lamongan**

Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan masih dalam 10 kabupaten atau kota dengan penduduk terbanyak se-Provinsi Jawa Timur. Dari jumlah penduduk tersebut sebanyak 1.455 juta beragama islam (BPS, 2021). Rasio jenis kelamin di Kabupaten Lamongan sebesar 100,45. Hal tersebut dapat diindikasikan bahwa pada 100 jumlah penduduk perempuan, terdapat setidaknya 100 penduduk laki-laki (BPS, 2021). Penduduk Kabupaten Lamongan Pada Tahun 2010 paling banyak berusia 10-14 sebesar 103,046 jiwa (BPS, 2018).

Berdasarkan Badan Pusat Statistika mencatat jumlah penduduk yang berumur 15 Tahun keatas yang bekerja sebanyak 646.425 jiwa, Ibu rumah tangga sebanyak 160, 151 jiwa dan lainnya sebanyak 23.432 (BPS, 2021). Kabupaten Lamongan memiliki 27 kecamatan. Berikut merupakan jumlah desa/kelurahan, persentase penduduk dan rasio jenis kelamin pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Lamongan (BPS, 2021).

Tabel 2.1.3  
Data Kependudukan Kabupaten Lamongan Tahun 2020

| No. | Kecamatan   | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah Penduduk | Persentase Penduduk (%) | Rasio Jenis Kelamin |
|-----|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 1.  | Sukorame    | 9                     | 21671           | 1,57                    | 99,66               |
| 2.  | Bluluk      | 9                     | 2316            | 1,67                    | 97,39               |
| 3.  | Ngimbang    | 19                    | 49008           | 3,55                    | 100,61              |
| 4.  | Mantup      | 15                    | 46795           | 3,39                    | 98,37               |
| 5.  | Kembangbahu | 18                    | 50154           | 3,64                    | 100,63              |
| 6.  | Sugio       | 21                    | 63069           | 4,57                    | 100,06              |
| 7.  | Kedungpring | 23                    | 62642           | 4,54                    | 101,32              |
| 8.  | Modo        | 17                    | 51386           | 3,72                    | 99,71               |
| 9.  | Babat       | 21                    | 92301           | 6,69                    | 102,64              |
| 10. | Pucuk       | 17                    | 49785           | 3,61                    | 101,18              |
| 11. | Sukodadi    | 20                    | 57823           | 4,19                    | 98,73               |
| 12. | Lamongan    | 12                    | 69517           | 5,04                    | 97,96               |
| 13. | Tikung      | 13                    | 45983           | 3,33                    | 98,80               |

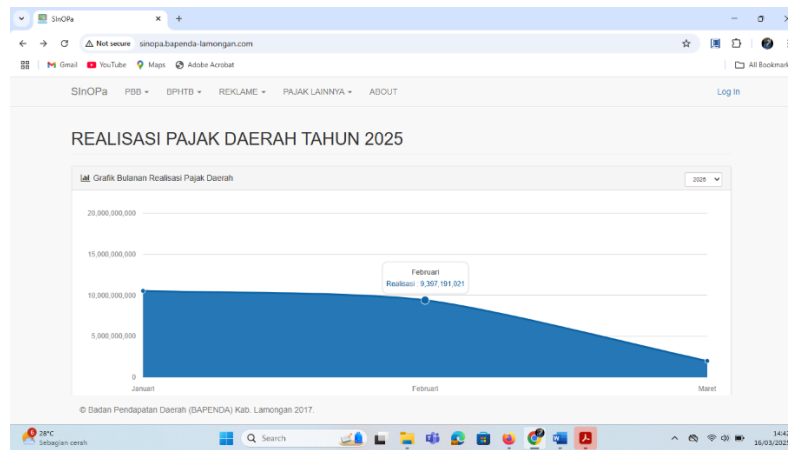
|                      |                |            |                |            |               |
|----------------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|
| 14.                  | Sarirejo       | 9          | 24958          | 1,81       | 98,76         |
| 15.                  | Deket          | 17         | 44030          | 3,19       | 100,73        |
| 16.                  | Glagah         | 29         | 41539          | 3,01       | 101,02        |
| 17.                  | Karangbinangun | 21         | 40445          | 2,93       | 100,75        |
| 18.                  | Turi           | 19         | 54273          | 3,93       | 102,46        |
| 19.                  | Kalitengah     | 20         | 35867          | 2,60       | 99,76         |
| 20.                  | Karanggeneng   | 18         | 43702          | 3,17       | 99,46         |
| 21.                  | Sekaran        | 21         | 48091          | 3,49       | 101,02        |
| 22.                  | Maduran        | 17         | 36474          | 2,64       | 100,15        |
| 23.                  | Laren          | 20         | 51399          | 3,73       | 100,10        |
| 24.                  | Solokuro       | 10         | 48057          | 3,48       | 99,63         |
| 25.                  | Paciran        | 16         | 97803          | 7,09       | 101,70        |
| 26.                  | Brondong       | 9          | 77023          | 5,58       | 101,79        |
| 27.                  | Sambeng        | 22         | 52727          | 3,82       | 100,77        |
| <b>Kab. Lamongan</b> |                | <b>474</b> | <b>1379628</b> | <b>100</b> | <b>100,45</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Lamongan

#### 2.1.4 Kualitas Informasi Website SiNOPa

Sistem Informasi Nomor Objek Pajak (SiNOPa) merupakan sistem informasi yang dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Sistem informasi ini dapat diakses melalui *website* resmi Kabupaten Lamongan yaitu [portal.lamongankab.go.id](http://portal.lamongankab.go.id) pada bagian bawah halaman *website* tersebut. SiNOPa ini dapat diakses menggunakan *internet browser* seperti *Mozilla Firefox*, *Google Chrome*, *Opera Mini*, *Internet Explore*, dan sebagainya.

Gambar 2.1.4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 Melalui SiNOPa



Sumber : <http://sinopa.bapenda-lamongan.com/>

Gambar tersebut menunjukkan tampilan sebuah *website* bernama “SiNOPa” yang merupakan Sistem Informasi Nomor Objek Pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan. Pada layar terlihat grafik realisasi pajak daerah untuk tahun 2025, yang menampilkan data bulanan dari Januari hingga Maret 2025. Grafik tersebut menggambarkan tren penerimaan pajak daerah dalam tiga bulan pertama tahun 2025, dengan nilai pajak yang tertinggi pada bulan Januari dan mengalami penurunan secara bertahap hingga Maret.

Pada bulan Februari, data menunjukkan realisasi pajak sebesar Rp.9.379.191.021. Hal ini terlihat dari titik data yang ditampilkan dalam grafik, di mana terdapat label yang memberikan informasi spesifik tentang jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Tren penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, atau faktor ekonomi yang mempengaruhi pemasukan daerah.

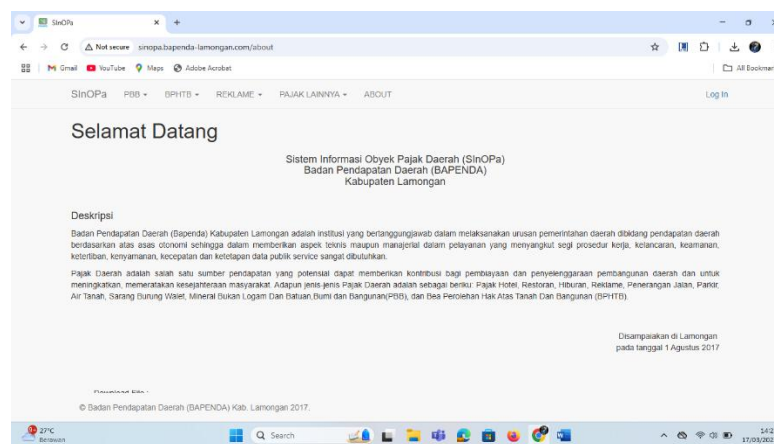
Terdapat menu navigasi yang mencakup beberapa kategori pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), reklame, serta pajak lainnya. Ini menunjukkan bahwa sistem ini digunakan untuk memantau berbagai jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah Kabupaten Lamongan. Selain itu, pada bagian bawah tampilan terdapat keterangan bahwa situs ini dikelola oleh BAPENDA Kabupaten Lamongan sejak tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi ini sudah berjalan cukup lama untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.

#### **2.1.5 Kualitas Sistem**

Sistem Informasi Nomor Objek Pajak (SiNOPa) merupakan sistem yang menampilkan informasi SPPT dan Sejarah SPPT yang sekaligus menunjukkan status sudah atau belum terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan. Sistem informasi ini sudah dibuat sejak tanggal 1 Agustus 2017 oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Namun, baru di publikasikan ke masyarakat terutama wajib pajak pada bulan oktober 2017. Dalam pengaksesan SiNOPa tersebut sangat diperlukan adanya koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan mengakibatkan kecepatan akses SiNOPa juga baik yang mana ketika Wajib Pajak memasukan NOPnya ke dalam SiNOPa pun bisa langsung memberikan respon penyajian data berupa informasi SPPT secara seketika. SiNOPa selain memiliki kecepatan akses yang cepat, juga tidak mudah mengalami *error*, namun tergantung koneksi internet yang digunakan saat pengaksesan. Kemudian

dari segi keamanan rahasia informasinya, SiNOPa terjamin aman karena hanya bisa diakses jika memasukkan NOP Wajib Pajak yang mana diketahui oleh Wajib Pajak dan pegawai yang bertugas sebagai penginput data-data informasi SPPT Wajib Pajak.

Gambar 2.1.5 Halaman Dari Website Aplikasi SiNOPa



Sumber : <http://sinopa.bapenda-lamongan.com/>

Aplikasi Sistem Informasi Nomor Objek Pajak (SiNOPa) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan. Pada gambar ini memberikan penjelasan mengenai peran dan fungsi Bapenda dalam mengelola pajak daerah serta pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Secara keseluruhan gambar ini memberikan gambaran bahwa SiNOPa merupakan sistem informasi berbasis *website* yang dikembangkan oleh Bapenda Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan berbagai fitur yang mendukung pengelolaan berbagai jenis pajak, sistem ini berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2 Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan**

Menurut Badrudin (2011:99) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan bersama DPRD Kabupaten Lamongan telah mengesahkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APDB) Lamongan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3,4 triliun. Secara rinci APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 yakni pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,466 triliun. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3,486 triliun, dengan surplus senilai Rp19,3 miliar, sebagai penyeimbang dilakukan pembiayaan melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp100 miliar. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp80,682 miliar.

Tabel 2.2  
Pertumbuhan PAD Kabupaten Lamongan 2015-2023

| <b>Tahun</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b> |
|--------------|------------------------------------|
| 2015         | 108.606.009.650                    |
| 2016         | 124.605.655.230                    |
| 2017         | 178.889.656.550                    |
| 2018         | 266.767.894.117,12                 |
| 2019         | 317.130.114.464,67                 |
| 2020         | 413.033.141.634                    |
| 2021         | 471.567.901.740                    |
| 2022         | 503.985.109.600                    |
| 2023         | 554.416.251.400                    |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lamongan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 hingga 2023. Pada tahun 2015, PAD Kabupaten Lamongan tercatat sebesar Rp.108,6 miliar. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai Rp554,4 miliar pada tahun 2023. Pertumbuhan PAD yang konsisten ini mencerminkan peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah oleh pemerintah daerah kabupaten lamongan.

Salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan PAD adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan berbagai sumber pendapatan seperti, pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerapan program digitalisasi seperti *website* SiNOPa

untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Peningkatan PAD ini sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan sumber pendapatan yang semakin besar, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk berbagai sektor strategis. Selain itu, kemampuan pemerintah dalam meningkatkan PAD juga mencerminkan keberhasilan desentralisasi fiskal, yang mana daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri.

### **2.3 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah salah satu SKPD yang terdapat dalam pemerintah daerah. Tugas dari Bapenda yaitu melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah. Bapenda akan melakukan banyak pencatatan pendapatan dan beban atau belanja. Dimana dalam PP 71 Tahun 2010 pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban harus dicatat menggunakan akrual basis. Pada awal pembentukan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), Badan Pendapatan Daerah diberi nama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Seiring dengan kebijakan pemerintah daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008, pada tahun 2009, Dispenda bergabung dengan SKPD lain yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Pada tahun 2013 Peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013, hal ini menyebabkan DPPKAD kembali berpisah dan

berdiri sendiri-sendiri menjadi Bapenda dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah). Hal tersebut bertahan sampai dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tahun 2017.

Badan Pendapatan Daerah Lamongan adalah badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan atas asas otonomi sehingga dalam memberikan aspek teknis maupun manajerial dalam pelayanan yang menyangkut segi prosedur kerja, kelancaran, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kecepatan, dan ketetapan, dan public service sangat dibutuhkan. Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki simbolis dalam memberikan pelayanan dalam berbagai aspek demi mewujudkan yang ingin dicapai dengan slogan “3T” yakni tertib, teratur, dan tepat waktu. Sehubungan dengan visi

Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”. Dengan adanya visi tersebut Badan Pendapatan Daerah Lamongan memiliki komitmen yang sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan. Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembagian dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi lain Bapenda Kabupaten Lamongan mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja atau kinerja organisasi di Kabupaten Lamongan

#### **2.4 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki tugas utama untuk merencanakan pembangunan daerah di Kabupaten Lamongan. Peran Bappelitbangda sangat strategis dalam merumuskan kebijakan, program, serta prioritas pembangunan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di wilayah kabupaten lamongan. Bappelitbangda juga melakukan penelitian dan kajian sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Bappelitbangda bertanggung jawab menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi dasar arah pembangunan Kabupaten Lamongan. Bappeda berperan sebagai penghubung antara berbagai instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Bappelitbangda mengawasi pelaksanaan pembangunan untuk memastikan program-program berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi hasil pembangunan untuk perbaikan di masa depan. Bappelitbangda Kabupaten Lamongan juga bertindak sebagai fasilitator dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan peran strategisnya, Bappelitbangda menjadi ujung tombak dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Lamongan untuk mencapai visi daerah yang lebih maju dan sejahtera.

## **2.5 Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Lamongan**

Kecamatan Lamongan merupakan salah satu wilayah administrasi binaan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan, Kabupaten Lamongan mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat daerah, beberapa desa dan kecamatan yang masing-masing memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Secara administratif, pemerintahan kabupaten lamongan dipimpin oleh seorang camat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan masyarakat di daerah tersebut.

Kecamatan Lamongan mempunyai letak yang strategis sebagai pusat kabupaten lamongan dan menjadi pusat kegiatan administrasi, ekonomi dan sosial budaya. Hal ini memberikan peran penting bagi sub-kabupaten, terutama dalam penyediaan layanan publik kepada masyarakat pedesaan. Sebagai pusat pemerintahan kabupaten, berbagai otoritas, kantor pelayanan dan lembaga pelayanan publik juga berlokasi di kawasan ini.

Dalam hal pelayanan publik, pemerintah kecamatan lamongan berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat setempat. Layanan prioritas meliputi pengelolaan kependudukan, perizinan, dan dukungan terhadap program pembangunan desa. Selain itu, pemerintahan kecamatan juga berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan program-program daerah dilaksanakan secara merata dan tepat sasaran.

## **2.6 Gambaran Umum Kelurahan Sukomulyo**

Kelurahan sukomulyo merupakan salah satu kecamatan di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis kelurahan ini terletak pada kawasan strategis yang dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten lamongan. Kawasan Kelurahan Sukomulyo merupakan kawasan dengan akses yang baik terhadap berbagai fasilitas umum. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain di kabupaten lamongan dan saling berhubungan dalam kegiatan sosial ekonomi.

Penduduk kelurahan sukomulyo sangat padat dan terdiri dari masyarakat dengan berbagai pekerjaan, tingkat pendidikan, dan latar belakang budaya. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor jasa, komersial, dan pemerintahan. Prasarana Kelurahan Sukomulyo cukup baik. Jalan utama dan jalan penghubung di kawasan ini sudah beraspal sehingga memudahkan warga untuk beraktivitas. Kelurahan ini juga memiliki fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, pusat kesehatan masyarakat, dan fasilitas olah raga yang menunjang kehidupan sosial dan pendidikan warganya.

Secara keseluruhan Kelurahan Sukomulyo merupakan gambaran wilayah yang tumbuh dan berkembang, mencerminkan dinamisme masyarakat perkotaan modern, dengan tetap menjaga nilai-nilai lokal dan diharapkan dapat menjadi contoh kawasan yang mampu menyeimbangkan pembangunan ekonomi sosial.

## **2.7 Gambaran Umum Pemerintah Desa Made**

Desa Made merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki karakteristik geografis, demografis, dan administratif yang mencerminkan dinamika masyarakat pedesaan dengan potensi dan tantangan yang berbeda-beda. Sebagai bagian dari wilayah kabupaten lamongan, Desa Made mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Pemerintah Desa Made juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif desa. BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah desa. Secara sosial masyarakat Desa

Made dikenal memiliki budaya gotong royong yang kental. Tradisi ini tercermin dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti pembangunan prasarana desa, perayaan hari raya dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Letak Desa Made yang strategis membuka peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata tanah air, seperti pariwisata dan pertanian.

Namun dengan perencanaan pembangunan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, Desa Made mempunyai peluang yang sangat baik untuk menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing. Desa Made mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan lokal dan regional. Dengan potensi alam dan budaya yang dimiliki serta semangat gotong royong masyarakat, Desa Made diharapkan terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi kabupaten lamongan.

## **2.8 Gambaran Umum Pemerintah Desa Tanjung**

Pemerintahan Desa Tanjung dipimpin oleh seorang kepala desa yang didukung oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun, dan staf lain yang berperan dalam administrasi serta pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa berkoordinasi dengan BPD yang mewakili aspirasi masyarakat. Sebagai instansi pemerintahan di tingkat akar rumput, Desa Tanjung melaksanakan berbagai fungsi administrasi publik.

Masyarakat Desa Tanjung umumnya memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam berbagai kegiatan desa, termasuk musyawarah, gotong royong, dan pelaksanaan program pemerintah. Namun, desa ini juga menghadapi tantangan

seperti keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Desa Tanjung memiliki luas wilayah yang mencakup area perkampungan, lahan pertanian, dan sumber daya alam lain yang menjadi basis kehidupan masyarakatnya.

Sebagai desa yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian, Desa Tanjung memiliki potensi besar dalam pengembangan agrikultur. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi padi, jagung, dan hasil perikanan,. Selain itu, beberapa masyarakat juga mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis pada pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Dengan dukungan dari masyarakat dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Desa Tanjung diharapkan dapat terus berkembang menjadi desa yang mandiri dan berdaya saing.